

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Secara geografis, letak Indonesia dan Australia sangat berdekatan. Faktor tersebut mempengaruhi eksistensi hubungan kedua negara yang khas. Dengan masing-masing kepentingan Nasionalnya, kedua negara membangun suatu hubungan yang penuh dinamika dari waktu ke waktu.

### **B. Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori yang ada kemudian membuktikan hipotesa dengan menggunakan fakta dan data.
2. Memperbanyak bahan-bahan kajian dengan tema yang sesuai dalam mata kuliah Politik Luar Negeri Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui apa saja peran AIMF dalam hubungan Indonesia-Australia.
4. Untuk memenuhi mata kuliah Skripsi, yang digunakan sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat. Hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang.

Masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Australia-Indonesia. Hubungan kita telah berkembang semakin luas dan semakin dalam. Wisatawan Australia memilih Indonesia sejak 1970-an, Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi orang Australia.

Penerbangan Garuda, Qantas, Sempati dan Merpati mengangkut penumpang dari Australia ke Indonesia dan sebaliknya. Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Bali merupakan propinsi yang paling dikenal. Sekarang, orang Australia mulai tertarik mengunjungi daerah-daerah lain di Indonesia. Semakin banyak yang mulai mengunjungi kota-kota, seperti Jakarta, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Kupang, selain Denpasar. Kepariwisataannya telah menjadi cara yang penting untuk meningkatkan pengetahuan orang Australia tentang bahasa dan budaya Indonesia.

Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 telah ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya tersebut

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memasuki Timor Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia di tahun 1976. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia. Di samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur di tahun 1975 telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media. Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun 1979.

Kemerdekaan bagi Timor Timur. Dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Di bulan Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan otonomi kepada Timor Timur. Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka Indonesia akan menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dan Portugis menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka.

Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi.

Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Jakarta menyetujui keterlibatan Angkatan Internasional Pemelihara Keamanan di

dan menerima tugas ini. Kakuatan internasional di Timor Timur atau *International Force in East Timor* (disingkat INTERFET) telah berhasil dikirim ke Timor Timur dan menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.

Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Australia-Indonesia dalam jangka pendek tersebut.

Namun, kedua negara telah sepakat untuk memandang ke depan, bukan ke belakang, disertai semangat yang positif, dan keduanya sepakat untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Kerja sama antara Pemerintah Australia-Indonesia dan hubungan antara kedua bangsa telah semakin meningkat. Pemerintah kedua negara bekerja keras untuk membina saling pengertian antara bangsa Indonesia dan Australia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kemudian dikembangkan hubungan yang lebih akrab dalam perniagaan, politik, pendidikan, kesenian, media dan komunikasi, olah raga dan profesi

Salah satu perkembangan yang penting dalam hubungan Australia-Indonesia adalah ditandatanganinya Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989. Perjanjian tersebut adalah mengenai pemanfaatan bersama minyak/gas alam di Laut Timor pada perbatasan Timor Timur dan Australia. Perjanjian yang

perjanjian baru yang ditandatangani oleh Australia dan Timor Timur sesudah kawasan ini mencapai kemerdekaannya.

Hubungan Australia-Indonesia kembali sensitif menyusul rencana Canberra memperkuat sistem pertahanan rudal (*air to surface*) yang akan dimulai pada tahun 2007-2009. Proposal untuk melengkapi sistem pertahanan udara dengan rudal-rudal yang memiliki daya jangkauan sampai 400 kilometer itu telah mengundang reaksi keras dari Jakarta.

Reaksi itu tidak saja terkait dengan realitas bahwa wilayah Indonesia, termasuk titik-titik strateginya, menjadi bagian dalam jangkauan sistem rudal Australia tersebut, namun lebih dari itu karena Jakarta merasa tidak pernah mendapat konfirmasi maupun penjelasan sebelumnya untuk keperluan apa dan kemana moncong-moncong rudal tersebut diarahkan. Realitas itu juga agaknya semakin memperkuat kecurigaan masih belum berubahnya anggapan Australia bahwa Indonesia merupakan bagian dari ancaman dari utara.

Konsep ancaman dari utara dan Indonesia adalah bagian di dalamnya, bisa jadi tidak banyak berubah dari waktu ke waktu dan bahkan menjadi semacam *underlying assumption* bagi perkembangan pertahanan Australia. Mulai dari konsep *forward defence* tahun 1970-an, *continental defence* tahun 1976, dan yang paling mencuat adalah Dibb Review tahun 1986, serta, terakhir dalam buku putih pertahanan Australia tahun 2001, negeri kangguru

Pemahaman ini seringkali menghasilkan kebijakan-kebijakan keamanan yang dinilai kurang sensitif dan terasa “arogan” bagi tetangga-tetangganya di utara. Terlebih dengan adanya kenyataan bahwa upaya *engagement* Australia terhadap Asia tidak selalu berjalan mulus dan konsisten, serta fluktuasinya seringkali dipengaruhi oleh pergantian rezim di dalamnya, menyebabkan kebijakan-kebijakan keamanan yang diambil Australia terkadang justru menimbulkan persoalan baru dalam hubungannya dengan tetangga-tetangganya di utara.

Namun di atas semuanya, ada kontinuitas yang relatif jelas dari pandangan Australia terhadap para tetangganya di utara, khususnya Indonesia, yakni sebagai potensi kawan sekaligus sumber ancaman utama. Dari perspektif itu tampak bahwa meskipun secara geografis kedua negara ini saling berdekatan, namun kerap kali masih belum saling memahami dan sering memandang sebagai *stranger neighbour*.

Tentu saja adalah hak setiap negara untuk mengasumsikan siapa yang menjadi potensi ancaman baginya. Bahwa Indonesia diasumsikan sebagai sumber ancaman itu pun bukan tanpa alasan. Sikap politik Jakarta di masa lalu yang terkesan “ekspansionis” dalam konfrontasi Malaysia maupun Integrasi Timor Timur, kiranya tidak begitu saja hilang dalam “memori kolektif” masyarakat Australia, bahkan acap kali menjadi semacam justifikasi historis untuk mencitrakan Jakarta sebagai ancaman terbesar bagi Canberra.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/pubs/asiainfo/0400/14/09ini/1762797.htm>

Karenanya, rencana pertahanan apa pun yang bisa dianggap sebagai langkah dalam kemandirian keamanan adalah sah adanya. Artinya, bahwa negara mana pun secara unilateral memang bertanggung jawab pada penciptaan keamanannya sendiri. Langkah nyata dari aspek ini seringkali berupa peningkatan kemampuan militernya secara relatif untuk melindungi keamanan nasionalnya.

Namun, dalam implementasi setiap doktrin pertahanan, dampak-dampak yang menyertainya harus juga dilihat secara seksama. Salah satu dampak dari kebijakan *military building* seperti diungkapkan Jervis (1996), adalah akan semakin manajamkan benih-benih konflik yang memang sudah ada, serta dalam derajat tertentu justru bisa mendorong semakin tingginya derajat dilema keamanan (*security dilemma*).

Dilema keamanan secara sederhana adalah suatu situasi dimana di tengah-tengah rendahnya saling percaya dan tingginya kecurigaan, setiap upaya salah satu negara dalam membangun kapabilitas militernya untuk menjaga keamanannya sendiri, seringkali menimbulkan rasa terancam negara lain (dan sekitarnya) sehingga negara terakhir melakukan upaya sebanding dengan meningkatkan pula kapabilitas militernya. Upaya pihak terakhir ini pun akan dianggap sebagai ancaman baru oleh pihak pertama sehingga diantara mereka terjebak dalam perlombaan senjata yang dapat mengancam stabilitas keamanan bilateral maupun multilateral.

Dilema keamanan terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak

meningkatkan kapabilitas militer mereka, sehingga menimbulkan perlombaan senjata

bisa menjadi dampak paling dini dilema keamanan. Akibatnya, energi dan biaya yang seharusnya bisa direlokasi kepada aspek non-keamanan, akhirnya terkonsentrasi ke situ.

Dari sisi penataan keamanan, perlombaan senjata, dalam derajat tertentu memang bisa menghasilkan *deterrence* yang bisa menghindarkan kemungkinan terjadinya perang karena terbentuknya *balance of terror*. Namun, dengan tiadanya jaminan bahwa keseimbangan ini bisa terjaga kontinuitasnya, perlombaan senjata tidak saja berisiko bagi semakin “mahalnya” sebuah stabilitas keamanan, lebih dari itu berarti memberi peluang lebih besar bagi terjadinya sebuah konfrontasi.

Persoalan-persoalan “kecil” seperti salah menafsirkan intensi lawan akibat *human error*, atau terjadinya “kecelakaan” serangan akibat piranti keras atau lunak mengalami kendala-kendala teknis, adalah sedikit contoh risiko yang dapat menggelindingkan bola salju peperangan. Artinya, mekanisme ini memberi peluang hanya satu langkah lagi bagi terjadinya konfrontasi.

Persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konflik di kawasan Asia Pasifik. Namun dengan komunikasi yang efektif melalui sebuah lembaga akan memperbaiki persepsi masing-masing negara.

Lembaga Australia-Indonesia didirikan pada tahun 1989. Lembaga ini bertujuan untuk :

2. Memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai keanekaragaman budaya di Australia, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi;
3. Mengembangkan pengertian masyarakat Australia mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia peluang kerjasama ekonomi.<sup>2</sup>

Lembaga ini mendorong adanya hubungan antara orang Australia dan Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, media, perniagaan, ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan kesenian.

Dinamika hubungan Australia-Indonesia Ministerial Forum (AIMF). Pertemuan AIMF adalah pertemuan bilateral tingkat menteri antara Indonesia dan Australia. AIMF dibentuk pada tahun 1992. Pertemuan AIMF kali ini adalah yang ke-7 dan merupakan yang kedua sejak kembali membaiknya hubungan di antara kedua negara bertetangga setelah berakhirnya persengketaan soal Timor Timur pada tahun 1999. Pertemuan AIMF sebelumnya diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2003.<sup>3</sup>

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yang bisa dijadikan sumber penelitian, yaitu “Apa peran AIMF dalam dinamika hubungan Indonesia-Australia?”

## E. Landasan Pemikiran

### 1. Teori Peran (*Role Theory*)

Sosiolog Robert Park dari Universitas Chicago memandang bahwa masyarakat mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kekuatan-kekuatan individu-individu ke dalam berbagai macam peran (*roles*). Melalui peran inilah kita menjadi tahu siapa diri kita. Kita adalah seorang anak, orang tua, guru, mahasiswa, laki-laki, perempuan, islam, kristen. Konsep kita tentang diri kita tergantung pada peran yang kita lakukan dalam masyarakat. Beberapa teori yang melandasi perspektif struktural adalah Teori Peran (*Roles Theory*).

Walau Park menjelaskan dampak masyarakat atas perilaku kita dalam hubungannya dengan peran, namun jauh sebelumnya Robert Linton (1936), seorang antropolog, telah mengembangkan Teori Peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati

Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder (1975) membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan "*life-course*" memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Contohnya, sebagian besar warga Amerika Serikat akan menjadi murid sekolah ketika berusia empat atau lima tahun, menjadi peserta Pemilu pada usia delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, mempunyai istri/suami pada usia dua puluh tahun, pensiun pada usia enam puluh tahun. Di Indonesia berbeda. Usia sekolah dimulai sejak tujuh tahun, punya pasangan hidup sudah usia tujuh belas tahun, pensiun usia lima puluh lima tahun. Urutan tadi dinamakan "*tahapan usia*" (*age grading*). Dalam masyarakat kontemporer kehidupan kita dibagi ke dalam masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua, dimana setiap masa mempunyai bermacam-macam pembagian lagi.<sup>4</sup>

Teori tersebut berlaku pada komunitas atau organisasi yang dibentuk agar menjalankan peran tertentu. Baik Indonesia maupun Australia membentuk AIMF sebagai forum komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kedua negara berharap forum tersebut dapat menjalankan perannya secara efektif.

AIMF didirikan pada tahun 1992 dengan tujuan memperluas hubungan kedua negara di bidang kerja sama ekonomi dan perdagangan

serta mengembangkan dimensi kelembagaan baru dalam hubungan tersebut.

Karena forum tersebut merupakan forum tingkat menteri, maka anggota forum tersebut adalah para eksekutor kebijakan dari masing-masing pemerintah, sehingga forum ini diharapkan mampu mengkoordinir kebijakan-kebijakan yang kontroversi antar kedua negara bahkan lebih jauh lagi forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan bentuk kerjasama yang efektif.

## 2. Konsep Kerjasama Bilateral

Dalam ensiklopedia Wikipedia, kerjasama bilateral diartikan sebagai kerja sama antara dua pemerintah suatu negara (*Inter Government*) untuk mencapai tujuan bersama.

Masing-masing memiliki kepentingan nasional yang sama pada suatu kondisi dan berbeda pada kondisi yang lain. Apabila dua negara memiliki kesamaan kepentingan maka terbuka peluang untuk diadakannya suatu bentuk kerja sama. Namun walaupun kepentingannya berbeda suatu kerjasama bisa terjalin sepanjang mendukung masing-masing kepentingan kedua negara tersebut.<sup>5</sup>

Australia memiliki kepentingan dalam hubungannya dengan Indonesia diantaranya yaitu masalah keamanan. Australia merasa perlu

kemungkinan-kemungkinan yang mengancam keamanan Australia dalam hubungannya dengan negara-negara Asia lainnya. Sedangkan Indonesia memiliki kepentingan yang paling utama yaitu dalam hal pendidikan dan ketenagakerjaan.

Hubungan baik RI-Australia memang sebaiknya dinormalisasi secara serius. Sebab, kedua negara sesungguhnya kini saling membutuhkan satu sama lain. Lagi pula, hubungan bilateral itu telah dibangun dalam suatu konteks historis cukup panjang, sejak 1947. Saat itu, Australia di bawah PM Chifley (Partai Buruh) untuk pertama kalinya mengakui kemerdekaan RI.

Mengenai rasa saling membutuhkan antara RI dan Australia, itu tercermin dalam keharusan Jakarta-Canberra bekerja sama mengatasi isu pendatang (imigran) gelap dari Afganistan dan Timur Tengah, serta pemulangan pengungsi Timtim dari NTT. Selain itu, rasa saling membutuhkan sudah tercermin sejak dua tahun lalu, yang tercetus melalui Komunike Bersama AIMF (Australia-Indonesia Ministerial Forum) Bidang Politik, Ekonomi, dan Pertanian. Rencana aksi Kerja Sama Kesehatan; dan Nota Kesepahaman Kerjasama Perhubungan, yang pernah ditandatangani di Canberra pada tanggal 8 Desember 2000.<sup>6</sup>

Berdasarkan Komunike Bersama AIMF itu, Pemerintah Australia menegaskan bahwa *national interests*-nya berkaitan erat dengan stabilitas

bidang ekonomi-perdagangan, pemerintah Howard bersedia membantu Indonesia dalam hal promosi melalui apa yang disebut Program Pelatihan dan Pembentukan Kemampuan (*The Training Program and Capacity Building*), terutama bagi Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN).

### 3. Teori Persepsi

Menurut Kenneth Boulding, naluri dan kepribadian adalah segi-segi individual yang bersifat statik, sedangkan persepsi atau "citra" yang dimiliki individu bersifat dinamik, karena persepsi seringkali berubah. Ketika bereaksi terhadap dunia sekitar, sebenarnya kita bereaksi terhadap citra kita tentang dunia. Sedangkan dunia nyata dan persepsi kita tentang dunia itu sendiri mungkin berbeda.

Orang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka "ketahui" tanggapan seseorang terhadap situasi suatu negara tergantung bagaimana ia mendefinisikan situasi tersebut. Sebagaimana pendapat Thomas Frank dan Edward Wereisband bahwa : "Cara dua negara saling melihat satu sama lain menentukan cara mereka berinteraksi. Suatu pola kerjasama yang sistematis tidak mungkin berkembang diantara negara-negara yang masing-masing menganggap lawan sebagai negara yang agresor, tidak bermoral".<sup>7</sup>

Para pembuat keputusan, seperti halnya manusia lainnya, dipengaruhi oleh berbagai proses psikologik yang mempengaruhi persepsi

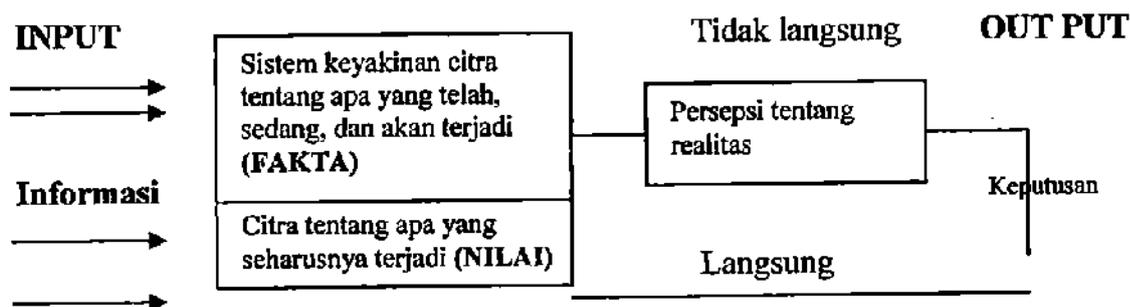
---

<sup>7</sup> Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teoritis*, Pusat Antar

(misalnya, kehendak untuk merasionalisasikan tindakan, untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan dan sebagainya dan proses psikologis lain yang membentuk kepribadiannya).

Bagaimana cara seseorang mempengaruhi persepsi tentang dunia sekitarnya? Russet dan Stars menjelaskan proses itu sebagai berikut :

### Hubungan antara Sistem Keyakinan dengan Pembuatan Keputusan Politik Luar Negeri



Sumber : R. Holsti, *The belief System and national Images : A Case Study*, dikutip dalam Bruce Russet and Harvey Stars, *World Politics* (New York; Freeman, 1985), hal. 304 dalam Mohtar Masoed, *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*, PAU UGM Yogyakarta, 1989, hal 21

Tanggapan seseorang terhadap situasi atau stimulasi didasarkan pada persepsinya tentang situasi itu. Para pembuat keputusan, seperti halnya manusia lainnya dipengaruhi oleh berbagai proses psikologis yang mempengaruhi persepsi (misalnya kehendak untuk menasionalkan

dan sebagainya) dan proses psikologis lainnya yang membentuk kepribadiannya.

Mula-mula keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya untuk menentukan apa stimulasinya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan. Kemudian berdasar sikap dan citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus dipresentasikan. Dalam hal ini terdapat dua jenis informasi yang baru, sedangkan citra yang tertutup karena alasan-alasan psikologis menolak perubahan dan karenanya mengabaikan saja informasi yang bertentangan dengannya. Tetapi baik citra yang terbuka dan tertutup, keduanya berfungsi sebagai saringan setiap orang yang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk, persepsi yang didasarkan pada citra yang sudah ada sebelumnya adalah proses seleksi. Sistem keyakinan adalah sekumpulan keyakinan citra atau model tentang citra yang dianut seseorang. Karenanya membantu berorientasi terhadap lingkungan, mengorganisasikan persepsi sebagai penuntut tindakan, menentukan tujuan dan bertindak sebagai saringan dalam menyeleksi informasi dalam setiap situasi.

Menurut Ole R. Holsty, reaksi atau tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh cara ia melihat, menafsirkan dan menilai lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Persepsi itu selain mengandung nilai-nilai yang menjadi standar seseorang dalam

merupakan ancaman atau bukan, dan lain-lain, juga mengandung keyakinan dasar yaitu keyakinan tentang suatu hal yang dianggap benar meskipun kebenaran itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>8</sup>

Menurut letaknya, Australia berada di kawasan Asia Pasifik yang berdekatan dengan negara-negara Asia lainnya. Posisi geografis tersebut menuntut Australia untuk berinteraksi dengan negara-negara tetangganya dan menjaga kestabilan hubungan dengan negara-negara tersebut, termasuk salah satunya yang paling utama adalah Indonesia.

Indonesia merupakan negara Asia yang terdekat dengan Australia. Kebijakan dalam dan luar negeri pemerintah Indonesia oleh banyak pengamat di Australia dijadikan sorotan yang serius, dengan maksud untuk mengantisipasi kebijakan-kebijakan pemerintah RI yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi keamanan Australia.

Peristiwa masuknya Irian Barat ke dalam kedaulatan Republik Indonesia, konfrontasi Malaysia dan disintegrasi Timor Timur merupakan rangkaian peristiwa yang mempengaruhi keamanan Australia bagi banyak pengamat dan pengambil keputusan di Australia.

Lepas dari itu kepulauan Indonesia membentang luas dan membatasi Australia dengan negara Asia lainnya. Hal tersebut dipandang Australia sebagai "tameng" perlindungan dari bahaya yang mungkin datang dari luar. Oleh karena itu keberadaan Indonesia dalam persepsi

---

<sup>8</sup> Ole R. Holsty, *Foreign Policy Formation Viewed Cognitive*, dalam Axerod (ed), *Structure of*

## G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan berfungsi untuk membatasi pembahasan pada topik yang akan diangkat dalam sebuah karya ilmiah. Sehingga nantinya pembahasannya tidak mengalami perluasan, yang bisa menyebabkan hasil dari penulisan karya ilmiah menjadi rancu, kurang terfokus dan kurang ilmiah.

Penulisan ini memiliki batasan waktu yaitu sejak pembentukan AIMF tahun 1992 hingga pertemuan AIMF tahun 2005.

Namun tidak menutup kemungkinan digunakannya data-data yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan di atas di luar jangka waktu tersebut.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka pemikiran atau teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris.

Pengumpulan data dalam penulisan ini akan dilakukan dengan studi pustaka (*Library Reseach*) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, *literature*, majalah, jurnal, tabloid, *surfing* dan *browsing* internet

yang berkaitan dengan permasalahan yang ada